BAB II
TINJAUAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan tentang Kedai Kopi/*Coffee Shop*

a. Pengertian Kedai Kopi/*Coffee Shop*

Istilah kata *cafe* berasal dari bahasa Perancis yang berarti kopi. Orang Perancis menyebut kedai kopi dengan istilah cafe. Perancis menjadi salah satu Negara yang di juluki "Negeri Caffe" karena pesatnya perkembangan caffe disana dan dari Perancis lah *Cafe* mulai tersebar luas di dunia. *Cafe* atau *Coffee Shop* atau yang di kenal sebagai Kedai Kopi berasal dari Turki (Sekarang Istanbul). Coffee Shop pertamakali berdiri di Constatinopel di Turki (Istanbul) pada tahun 1475. Pada awalny *Coffee Shop* hanya menjual minuman kopi. *Cafe* atau *Coffee Shop* (*kedai kopi*) adalah suatu tempat (kedai) yang menyajikan olahan kopi *espresso* dan kudapan kecil. *Coffee shop* merupakan salah satu dari kedua puluh dua tipe restoran di atas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), kedai kopi *(coffee shop)* adalah suatu tempat (kedai) yang menyajikan olahan kopi espreso dan kudapan kecil. Seiring perkembangannya, selain menyediakan kopi sebagai produk utama, kedai ini menyediakan makan kecil dan makanan berat.

Seiring perkembangan jaman *coffe shop* menyediakan makan kecil dan makanan berat. Menurut Wiliam H. Ukers (1922), kata kopi mulai masuk ke dalam bahasa-bahasa eropa sekitar tahun 1600 – an. Kata tersebut diadaptasi dari bahasa Arab *qahwa*. Atau mungkin langsung dari istilah Arab tetapi melalui istilah Turki *kahveh*. Kopi merupakan jenis minuman yang sering dikonsumsi oleh manusia, selain itu kopi memiliki khasiat bagi tubuh. Kopi memiliki cita rasa yang khas sehingga sangat digemari oleh masyarakat. Peningkatan jumlah peminum kopi semakin tahunnya terus mengalami peningkatan dan kemudian menimbulkan kebiasaan yang baru.

b. Sejarah Kopi

Penemuan biji kopi dimulai sekitar tahun 800 SM. Pada saat itu orang-orang di benua Afrika,khususnya bangsa Etiopia mengkonsumsi biji kopi yang di campurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Penemuan biji kopi terjadi secara tidak sengaja ketika pengembala bernama Khalid mengamati kawanana kambing gembalanya yang tetap terjaga bahkan setelah matahari terbenam setelah memakan sejenis beri-beri'an, ia pun mencoba memasak dan memakanya.,namun metode penyajianya masih menggunakan metode konvesional.Beberapa ratus tahun kemudian bijikopi dibawa melewati Laut merah dan tiba di Arab dengan metode penyajiany yang lebih maju. Bangsa Arab saat itu tidak hanya memasaka biji kopi tetapi merebus biji kopi untuk di ambil sarinya. Kepopuleran kopi pun turut meningkat seiring dengan penyebaran Agama Islam pada saat itu. Pada masa itu belum ada budidaya tanaman kopi di luar daerah Arab karena bangsa Arab selalu mengekspor atau memasukan biji kopi yang tidak subur dengan cara memasak dan mengeringkanya terlebih dahulu, hal ini menyebabkan budidaya tanaman kopi tidak memungkinkan. Pada tahun 1600 seorang peziarah India bernama Baba Budan membawa biji kopi fertil keluar dari mekah dan membudidayakananya di berbagai daerah di luar Arab. Pada tahun 1615 biji kopi masuk pertama kali ke Eropa oleh seorang saudagar Venesia. Pasokan biji kopi yang di bawa ke Eropa berasal dari Turki,namun jumlah pasokan biji kopi ini tidak mencukupi kebutuhan pasar, oleh karena itu bangsa Eropa mulai membudidayakanya. Belanda adalah salah satu bagian negara Eropa yang pertama kali berhasil membudidayakanya pada tahun 1616,kemudian pada tahun 1690 biji kopi di bawa ke pulau Jawa untuk, Pada saat itu Indonesia masih merupakan negara jajahan Belanda.

c. Kopi

Secara terminologis, kata *café* berasal bahasa Perancis, yaitu *coffee*, yang berarti kopi (Oldenburg, 1989: hlm.126). Di Indonesia, kata *café* kemudian disederhanakan kembali menjadi kafe (Herlyana, 2012). Pengertian harafiahnya mengacu pada (minuman) kopi, yang kemudian dikenal sebagai tempat menikmati

kopi dengan berbagai jenis minuman non-alkohol lainnya seperti *soft drink* berikut sajian makanan ringan lainnya. Dari bahasa arab istilah qahwa diadaptasi ke dalam bahasa lainnya seperti bahasa Turki *kahve,* bahasa Belanda *koffie*, bahasa Perancis *Café*, bahasa Italia *caffee*, bahasa inggirs *Coffee*, bahasa Cina *Kiafey*. Pada faktanya hampir semua istilah untuk kopi di berbagai bahasa memiliki kesamaan bunyi dengan istilah Arab. Khusus untuk kasus Indonesia, besar kemungkinan kata kopi diadaptasi dari istilah Arab melalui bahasa Belanda *koffie*. Dugaan yang logis karena Belanda yang pertama kali membuka perkebunan kopi di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan kata tersebut diadaptasi langsung dari bahasa Arab atau Turki. Mengingat banyak pihak di Indonesia yang memiliki hubungan dengan bangsa Arab sebelum orangorang Eropa datang. Sejarah mencatat bahwa penemuan biji kopi sebagia minuman yang sangat berkhasiat dan berenergi pertam akali ditemukan oleh orang dari bangs Ethiopia yang bernama Khaldi sekitar 300 M, yaitu seseorang penggembala kambing. Syuatu hari Khaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya itu menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Setelah itu timbulah rasa penasaran yang mendorong Khaldi untuk mencoba biji-biji merah itu, setelah ia mencobanya dan merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang lain. Lalu Khaldi mengumpulkan segenggam biji kopi dan memberikannya kepada istrinya. Sang istri percaya bahwa biji-biji itu ajaib, dan sang istri membawanya kesebuah biara dan menceritakan keajaibannya tersebut. Setelah mendenga rceirita Khaldi, kepala biara itupun melemparnya kedalam api. Tak lama kemudian aroma biji kopi memenuhi seluruh biara, dan para biarawan mulai memunguti kembali biji-biji kopi ersebut sambil memukul-mukul biji kopi yang masih berapi untuk mematikan apinya. Dari kejadian tersebut, tanpa disengaja upaya tersebut malah membuat hancur biji-biji kopi tersebut. Menurut Wiliam H. Ukers (1922), asal usul kata kopi secara ilmiah mulai dibicarakan dalam *Symposium on The Etymology of The Word Coffee* pada tahun 1909. Dalam symposium ini secara umum kata kopi diyakini merujuk pada istilah dalam bahasa arab *qahwa,* yang mengandung arti kuat.

d. Kedai Kopi sebagai Budaya

Budaya *cangkrukan* atau *ngopi* sering dapat kita jumpai biasanya di warung kopi. Pelakunya tentu beraneka macam latar belakangnya, seperti pejabat, mahasiswa. Mereka meluangkan waktunya di warung kopi sekedar melepas penat terhadap aktivitas yang dijalaninya setiap hari. Apalagi kehidupan mereka berada di perkotaan yang identik dengan modernitas. dengan keberadaan budaya ngopi di warung kopi. Hal tersebut memuculkan bahwa warung kopi dijadikan sebagai ruang publik baru. Maksudnya, eksistensi warung kopi sebagai tempat pelampiasan aktivitas yang membuat kehidupan manusia teralienasi terkhusus bagi warga kota. Di warung kopi tak ada sekat pemisah bagi setiap warga didalam kedudukannya yang sama maupun posisi yang setara. Jadi, Ruang publik tanpa adanya dominasi kelas terdapat di warung kopi. Warung kopi telah berkembang menjadi media dalam mengekspresikan gaya hidup dan identitas kelas. Mengunjungi warung kopi telah berubah menjadi kode simbolik kalangan tertentu dalam mengaktualisasikan keberadaannya dalam kelompok sosial. Hal ini terlihat dari pengunjung warung kopi yang kini bukan hanya kaum pria, tapi juga sudah mulai diminati kaum wanita. Perubahan pola dan perilaku minum kopi tersebut semakin berkembang seiring dengan globalisasi yang dipertegas oleh ekspansi media. Bagi klapper, media massa mampu merekayasa kesadaran. Oleh Merton, media dapat menghaluskan paksaan sehingga tampak seperti bujukan (Rivers, 2003: hlm.39). Pengelompokan masyarakat di bedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok primer dan kelompok skunder. Menurut cooley, kelompok primer merupakan kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal-mengenal antara anggota-anggotanya serta kerjasama erat yang sifatnya pribadi, contohnya seperti keluarga teman sepermainan dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2007: hlm.110). Kelompok skunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang, yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribdi dan tidak langgeng, contohnya hubungan jualbeli (Soerjono Soekanto, 2007: hlm.114). Suatu kelompok dalam keluarga dan masyarakat terdapat cara-cara berfikir dan berbuat yang diterima dan diharapkan oleh setiap anggota kelompok atau

masyarakat. Pola kelakuan yang terdapat secara umum terdapat dalam suatu mayarakat disebut dengan kebudayaan. Kebudayan meliputi keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, keterampilan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan yang terdiri atas buah pikiran, sikap, nilai-nilai, dan kebiasaan individu-individu, dipelajari berkat hidup mereka dalam lingkungan sosial. Bagi setiap individu yang baru lahir, kebudayaan merupakan bantuan untuk melatih hidup yang efektif didunia ini. Generasi baru tidak perlu menemukan segala sesuatu dari mulanya akan tetapi dapat belajar dari orang-orang sekitarnya. Orang menyampaikan kebudayaan yang di pelajarinya dari generasi tua kepada generasi baru beserta hal-hal baru dan perubahan yang terjadi. Maka karena itu kebudayaan dapat dipandang sebagai kelakuan yang terdapat pada kebanyakan atau semua yang dipelajari dan dipelajari dari sesama anggota masyarakat itu sendiri. Manusia merupakan individu yang unik, namun banyak kelakuannya di pengaruhi oleh kebudayaan seperti pikiran, bahasa dan cara menghargai seseorang. Tidak seluruh kebudayaan dapat dituruti oleh setiap anggota masyarakat. Ada diantaranya yang boleh dikatakan diikuti oleh semua yang disebut dengan universal seperti bahasa, moral perkawinan. Manusia hidup dengan kebutuhan inilah yang akan menjadi satu elemen penting motivasi yang mengarahkan individu untuk berperilaku konsumtif. Tak jarang kemudian gaya hidup ini mendasari perilaku konsumen. Hal ini dimanfaatkan oleh produsen dan pemasar untuk memasarkan bisnisnya, seperti fenomena bergesernya fungsi kedai kopi yang kini tidak hanya menyediakan kopi, tetapi juga menjual gaya hidup yang digemari oleh semua kalangan masyarakat. Perilaku konsumtif sebagai bentuk penipuan massa, bagaimana citra-citra digunakan sebagai alat untuk mengendalikan selera massa konsumer. Dalam masyarakat kontemporer, budaya konsumsi dibentuk oleh kenyataan bahwa manusia sekarang dikelilingi oleh faktor konsumsi di mana yang dikonsumsi adalah tanda, simbol dan citra. Dalam hal ini kedai kopi merupakan salah satu peluang tempat usaha yang telah terkontaminasi oleh budaya materialism.

Globalisasi media telah memainkan peran dalam penyebaran budaya menikmati kopi di warung kopi. Budaya kontemporer ini berkaitan dengan selera masyarakat. Menurut Bourdieu selera adalah peluang baik untuk mengalami maupun untuk menegaskan posisi seseorang dalam lingkungan (Ritzer, 2011: hlm. 528). Mengenai ruang publik, dicirikan dengan adanya ruang kesepahaman yang sempit, karena seiring dengan semakin kompleksnya realitas kehidupan sehari-hari manusia. Akibatnya, realitas yang sedang dihadapi saat ini cenderung lebih promblematis dan tersistematis. Ruang kesepahaman yang sempit menjadikan manusia enggan menerima begitu saja realitas di sekelilingnya. Mereka cenderung berfikir secara kritis terhadap informasi, gagasan, wawasan yang diterimanya. Manusia mempersoalkan apa yang sedang dikonsumsinya, layanan yang diterima, serta kebijakan yang menyangkut kehidupan publik mereka. Dapat dikatakan manusia lebih mempersoalkan semua hal yang menyangkut kehidupannya. Kondisi seperti ini mengakibatkan perlunya situasi dan kondisi untuk memperluas kembali ruang kesepahaman yang sempit tersebut. Ruang kesepahaman tersebut hanya bisa dilahirkan melalui kehadiran dan penciptaan ruang publik. Eksistensi ruang publik merupakan wujud kebutuhan masyarakat, didalam memenuhi kepentingan-kepentingan setiap individunya. Adanya ruang publlik dimanfaatkan untuk membahas isu-isu yang terjadi di pemerintahan ataupun permasalahan publik didalam bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, sosial-budaya, agama dan sebagainya. Dengan kata lain ruang publik dapat diartikan sebagai wadah sharing opini publik yang dapat mempengaruhi kebijakan sesuai dengan permasalahan masyarakat. Berbicara mengenai sejarah ruang publik tidak dapat dipisahkan dari kemunculan warung-warung kopi pada era kapitalisme pada awal abad ke-13 di eropa. Warung kopi dijadikan arena diskursus bagi masyarakat yang sedang bertumbuh dari masyarakat feodal ke masyarakat borjuis. Dapat dilihat pula pada masa tersebut adanya perbedaan kelas antara kaum bangsawan dengan kaum pedagang atau rakyat kecil. Eksistensi warung kopi dapat dikatakan pula sebagai ruang publik baru tanpa adanya perbedaan kelas sosial pada setiap individu. Entah itu dari rakyat biasa hingga pejabat tinggi, dari buruh hingga pemilik modal, semuanya dapat berbaur satu sama lain. ciri utama dari interaksi di warung kopi

cenderung tidak hirakis, melupakan status sosial yang dipandang, bahkan semuanya sangat cair. Semua yang dibahas tak perlu terikat oleh pembatasan-pembatasan apapun. Tanpa adanya distori dan manipulasi tersebut, memungkinkan lahirnya masyarakat komunikatif. Artinya komunikasi yang dibangun oleh masyarakat akan menciptakan ikatan yang kuat dan integrasi sosial. Warung kopi bersifat menyatukan. Semua elemen masyarakat luntur ketika ia berada di warung kopi. Tanpa memandang status yang ia miliki, semua bercengkrama dengan suasana hangat yang menyatukan ditemani kopi sebagai media perbicangan sesama individunya. Mengutip teori dari Jurgen Habermas yang menjelaskan konsep tentang ruang publik adalah sebagai ruang yang mandiri dan terpisah dari negara *(state)* atau pasar *(market).* Hal ini sejalan dengan konsep ruang publik tanpa adanya dominasi kelas terdapat di warung kopi.

1. Tinjauan tentang Budaya

a. Pengertian Budaya

Ada beberapa pengertian budaya menurut beberapa ahli salah satu diantaranya adalah tokoh terkenal Indonesia yaitu Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat (2000: hlm.181) kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansakerta ”*buddhayah*”, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Jadi Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Koentjaraningrat menerangkan bahwa pada dasarnya banyak yang membedakan antara budaya dan kebudayaan, dimana budaya merupakan perkembangan majemuk budi daya, yang berarti daya dari budi. Pada kajian Antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definsi. Jadi kebudayaan atau disingkat budaya.Menurut Koentjaraningrat (2000, hlm.181), merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Untuk lebih jelasnya mengenai hal diatas, Koentjaraningrat membedakan adanya tiga wujud dari kebudayaan yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai- nilai,

norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyrakat. (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Menurut Liliweri (2002: hlm.8) kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Linton dalam Ihromi (2006: hlm.18)**.** Jadi kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Menurut O'Brien and Szeman dalam Danesi (2004: hlm.7) budaya populer adalah budaya yang ada karena sekelompok orang membuat atau melakukannya untuk diri mereka sendiri. Maka dari itu karena hal yang baru tersebut banyak diterima masyarakat maka muncullah budaya populer. Menurut Liliweri (2002), mendefinisikan kebudayaan tersusun oleh kategori-kategori kesamaan gejala umum yang disebut adat istiadat yang mencakup teknologi, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, estetika, rekreasional dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

b. Unsur Budaya

Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia, Kluckhon dalam bukunya yang berjudul *Universal Categories of Culture* membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kluckhon membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh

unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal. Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah :

1. Sistem Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

2. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya.

3. Sistem Sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok

masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatantingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

5. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

6. Sistem Religi

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan - kekuatan supranatural tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di

luar Eropa adalah sisa dari bentukbentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

7. Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknikteknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.

c. Budaya Literasi

Dr. Roger Farr (1984) menyebut bahwa "*reading is the heart of education*". Membangun Budaya Sadar Literasi Dr. Ngainun Naim, dalam buku "Geliat Literasi (2015)", dalam kata pengantarnya menulis, bahwa untuk menciptakan kemajuan peradaban suatu daerah salah satunya dengan menumbuhkembangkan tradisi literasi. Dalam konteks ini generasi muda yang juga generasi pembelajar seharusnya dapat mengambil peran aktif menjadi motor penggerak untuk melajunya budaya sadar literasi di lingkungannya masingmasing agar lebih massif. Tentang literasi, khususnya menulis, Hernowo (2005) dalam bukunya "Mengikat Makna" menyebut bahwa menulis dapat membuat pikiran seseorang lebih tertata, membuat seseorang bisa merumuskan keadaan diri, mengikat dan mengonstruksi gagasan, mengefektifkan atau membuat seseorang memiliki sugesti positif, membuat seseorang semakin pandai memahami sesuatu (menajamkan pemahaman), meningkatkan daya ingat, lebih mengenali diri sendiri, mengalirkan diri, membuang kotoran diri, merekam momen mengesankan yang dialami, meninggalkan jejak pikiran yang sangat jelas, memfasihkan komunikasi, memperbanyak kosa-kata, membantu bekerjanya imajinasi, dan menyebarkan pengetahuan. Bahkan berdasarkan riset yang yang dilansir baru-

baru ini di Eropa bahwa dengan membaca dapat mengurangi dua kali risiko terserang penyakit Alzheimer (pikun). majinasi, dan menyebarkan pengetahuan. Bahkan berdasarkan riset yang yang dilansir baru-baru ini di Eropa bahwa dengan membaca dapat mengurangi dua kali risiko terserang penyakit Alzheimer (pikun). Artinya, budaya literasi memang sangat penting, sehingga ketika generasi muda jauh dari budaya literasi, jangan salahkan anak cucu, jika mereka lebih mengenal Syahrini, Saskia Gothik, Cita Citata, Soimah, dkk, dibanding Soekarno, HOS Cokroaminoto, Agus Salim, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, Tan Malaka, atau tidak tahu sejarah bangsa dan tidak hafal pancasila. Hal itu bukanlah karena tidak ada literatur yang mengulas seputar itu, namun, kebiasaan ini yang tidak ditanamkan sejak dini. Di negara ini, kebanyakan orang membaca buku demi kepraktisan. Kebanyakan orang membaca buku agama karena ingin tahu cara masuk surga. Orang baca buku panduan bisnis karena ingin kaya. Padahal, ada dimensi lain tentang membaca, yakni belajar empati dan perspektif.

Pendidikan yang berkualitas menjadi kebutuhan penting di era persaingan global yang kian kompetitif. Para pengambil kebijakan di tingkat pusat pastinya sudah menyadari akan hal tersebut. Untuk menjadikan dunia pendidikan berkualitas, tentu sangat banyak faktor yang berkaitan dan saling memengaruhi. Salah satu upaya pemerintah menjadikan pendidikan berkualitas adalah melalui meningkatkan budaya literasi (membaca dan menulis). Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 telah menyadari pentingnya penumbuhan karakter peserta didik melalui kebijakan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Sesungguhnya gerakan literasi di Indonesia sudah dimulai pada zaman kependudukan Belanda, tradisi intelektual ini sudah dimunculkan sejak tingkat sekolah. Siswa AMS (sekolah Belanda) diwajibkan harus membaca 25 judul buku sebelum mereka lulus. Dengan kebijakan seperti itu kita bisa melihat hasilnya yaitu tradisi intelektual yang kuat dari para tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan yang mencicipi sistem persekolahan Belanda tersebut. Budaya literasi harus benar-benar tumbuh dan berkembang. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Literasi Dini [Early Literacy (Clay, 2001)] , yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar.
2. Literasi Dasar (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi (perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (drawing) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
3. Literasi Perpustakaan (Library Literacy), antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
4. Literasi Media (Media Literacy), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
5. Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), peranti lunak (software), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
6. Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori, maupun digital (perpaduan ketiganya disebut teks multimodal), perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun di

dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benarbenar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan.

Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal melainkan mengandung beragam arti (multi literacies). Ada bermacammacam keberaksaraan atau literasi , misalnya literasi komputer (computer literacy), literasi media (media literacy), literasi teknologi (technology literacy), literasi ekonomi (economy literacy), literasi informasi (information literacy), bahkan ada literasi moral (moral literacy). Jadi, keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melekteknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Kepekaan atau literasi pada seseorang tentu tidak muncul begitu saja. Tidak ada manusia yang sudah literat sejak lahir. Menciptakan generasi literat membutuhkan proses panjang dan sarana yang kondusif. Proses ini dimulai dari kecil dan dari lingkungan keluarga, lalu didukung atau dikembangkan di sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pekerjaan. Budaya literasi juga sangat terkait dengan pola pemelajaran di sekolah dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan. Tapi kita juga menyadari bahwa literasi tidak harus diperoleh dari bangku sekolah atau pendidikan yang tinggi. Kemampuan akademis yang tinggi tidak menjamin seseorang akan literat. Pada dasarnya kepekaan dan daya kritis akan lingkungan sekitar lebih diutamakan sebagai jembatan menuju generasi literat, yakni generasi yang memiliki ketrampilan berpikir kritis terhadap segala informasi untuk mencegah reaksi yang bersifat emosional. Berbagai faktor ditengarai sebagai penyebab rendahnya budaya literasi, namun kebiasaan membaca dianggap sebagai faktor utama dan mendasar. Padahal, salah satu upaya peningkatan mutu sumber daya manusia agar cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia adalah dengan menumbuhkan masyarakat yang gemar

membaca (*reading society*). Kenyataannya masyarakat masih menganggap aktifitas membaca untuk menghabiskan waktu (*to kill time*), bukan mengisi waktu (*to full time*) dengan sengaja. Artinya aktifitas membaca belum menjadi kebiasaan (*habit*) tapi lebih kepada kegiatan 'iseng'.

Menurut Kimbey (1975: hlm.662) kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya unsur paksaan. Kebiasaan bukanlah sesuatu yang alamiah dalam diri manusia tetapi merupakan hasil proses belajar dan pengaruh pengalaman dan keadaan lingkungan sekitar. Karena itu kebiasaan dapat dibina dan ditumbuhkembangkan. Sedangkan Menurut Wijono (1981) merupakan suatu proses komunikasi ide antara pengarang dengan pembaca, di mana dalam proses ini pembaca berusaha menginterpretasikan makna dari lambanglambang atau bahasa pengarang untuk menangkap dan memahami ide pengarang. Maka kebiasaan membaca adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara berulangulang tanpa ada unsur paksaan. Kebiasaan membaca mencakup waktu untuk membaca, jenis bahan bacaan, cara mendapatkan bahan bacaan, dan banyaknya buku/bahan bacaan yang dibaca. Kemampuan membaca merupakan dasar bagi terciptanya kebiasaan membaca. Namun demikian kemampuan membaca pada diri seseorang bukan jaminan bagi terciptanya kebiasaaan membaca karena kebiasaan membaca juga dipengaruhi oleh faktor lainnya (Winoto, 1994: hlm.151), seperti ketersediaan bahan bacaan.

2. Tinjauan tentang Literasi Politik

a. Pengertian Literasi Politik

Literasi menurut Bahasa Inggris yakni "*Literacy"* yang memiliki pengertian *the condition of being literate* atau dalam bahasa Indonesia adalah kondisi melek huruf. Di Indonesia berkembang istilah "literasi" yakni tidak terlepas dari informasi literasi yang banyak di kemukakan oleh para ahli. Literasi ataupun di dalam bahasa Inggris *literacy* adalah suatu landasan dan juga pondasi untuk aktivitas belajar dalam kehidupan. Ini menjadi sangat berarti untuk kelangsungan pembangunan manusia dalam kehidupan sosialnya dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Akan tetapi pandangan ini

menjadi salah ketika pengertian literasi ini hanya diartikan sebatas bisa membaca saja bukan mencoba untuk memahami sesuatu lebih dalam lagi.

Oleh sebab itu literasi lebih cocok dimaksudkan tentang keberaksaraan, sependapat dengan apa yang dikatakan Irkham dalam (Gong, A, Gol, 2012) bahwa, "literasi adalah keberaksaraan. Jadi secara tidak langsung pengertian dari literasi adalah sebuah pembelajaran mengenai cara membaca ataupun menulis". (Goody & Watt, 1963). "Literasi menyebabkan pemikiran yang bahkan membawa perubahan kehidupan manusia" (Donald, 1993).

Pada abad yang lampau, Literasi secara umum memang hanya di artikan sebagai kemampuan membaca dan menulis melalui aksara. Literasi dikaitkan pada kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan semata. Ini tampaknya menggambarkan kompetensi yang di butuhkan bagi insan untuk hidup dan berbudaya pada masanya. Dengan kata lain, perabadan atau kehidupan pada abad lampau memang membutuhkan dan mengutamakan kompetensi membaca menulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan kompetensi utama yang merupakan simbol pendidikan dasar atau umum pada masa tersebut. Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi yang antara lain ditandai oleh kehidupan yang sangat akrab dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni telah menuntut warganya untuk memiliki kemampuan dasar agar *survive* di tengah masyarakat. Untuk itu, budaya literasi sangat berperan penting dalam era globalisasi ini. Definisi juga menentukan bagaiamana kemajuan atau pencapaian dalam rangka menumbuhkan budaya literasi. Pembahasan tentang literasi dalam tulisan ini berfokus soal kebiasaan membaca. Sebagai kegiatan utama literasi di samping menulis, membaca juga terjadi perubahan pandangan.

Pendapat Bernard Crick dalam (Sutisna, 2017) dalam tulisannya *Essays on Citizenship*, "pengertian singkat mengenai literasi politik yaitu ketika seseorang paham secara praktis mengenai tata cara yang dilihat dalam sehari-hari. Mengenai paham seputar politik isu, bagaiman kecenderungan mereka dalam mempengaruhi anda". Sebenernya literasi politik itu lebih luas kalau dibandingkan dengan pengetahuan politik, karena dalam literasi politik itu kita membuat diri untuk menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam menjalankan hak serta kewajiban dalam

keadaan formal maupun di arek publik serta efektif dalam kehidupan publik. Sedangkan menurut Denver dan Hands (1990) dalam (Karim, dkk, 2015, hlm 5), "literasi politik merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu proses politik dan isu politik, suatu pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berpartisipasi) sebagai warga negara".

Melihat para pendapat ahli diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa literasi politik harus nyata dan diartikan sebagai sebuah keahlian untuk berbagi agar aktivitas ini berisi konten dan disampaikan melalui sebuah model transisi. Literasi politik memiliki potensi untuk dapat memberikan kewarganegaraan dengan dasar beberapa elemen seperti pengetahuan, ketelitian dan intelektual. Kaitannya dengan ini, Mudhok sebagaimana dikutip (Karim, dkk, 2015, hlm 6) menawarkan setidaknya 4 elemen literasi politik, antara lain:

1) Sadar akan hak dan juga perannya dalam aktivitas politik.
2) Untuk mendapatkan hasil yang baik maka dibutuhkan kemampuan dalam beropini agar peroses politik itu dapat berhasil dengan baik.
3) Masyarakat penting untung mengetahui tentang kerja dari pemerintahan.
4) Berantisipasi dalam aktivitas politik.

Dalam pandangan literasi politik, setiap warga negara seharusnya mempunyai pengetahuan politik yang memadai ketika harus terlibat dalam dunia politik karena sejatinya kehidupan setiap hari warga negara tidak pernah lepas dari kehidupan politik. Ketika warga negara tidak mempunyai pengetahuan politik yang memadai, maka resiko dia dipengaruhi dan dimanfaatkan para pelaku politik akan sangat besar. Disisi lain juga, pengetahuan politik akan menjadi panduan untuk warga negara ketika mereka harus berpartisipasi dalam politik setidaknya mereka tidak buta politik. Contohnya ketika seorang warga negara akan berpartisipasi dalam pemilu, tentu itu akan menjadi modal bagi dia untuk setidaknya paham mengenai aturan dan system pemilihan seperti apa. Begitu pula untuk para kontestan pemilu, seharusnya warga harus tahu benar tentang bagaimana track record calon kontestan itu. Dengan pengetahuan politik yang

baik, maka warga bisa dengan subjektif menilai tidak atas dasar dipengaruhi oleh calon kontestan pemilu.

Literasi politik berkait erat dengan pemahaman kritis warga atas hal-hal pokok terkait dengan politik, menyangkut pemahaman masyarakat mengenai politik itu sendiri, dan aspek aspek yang berhubungan dengan konsep negara, kekusaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian, dan alokasi yang merupakan hal pokok yang harus dipahami oleh warga untuk berpatisipasi aktif dalam politik (Bakti:2012). Rendahnya pemahaman kritis warga negara terhadap isu-isu politik kontemper tidak jarang diikuti oleh menurunnya partisipasi publik dalam proses-proses demokrasi.

Menurut UNESCO (2014: hlm.12) bahwa " *a literate person is one who can, with understanding, both read and write a short simple statement on his or her everyday life."* (Orang yang melek huruf adalah salah satu yang dapat, dengan pemahaman, baik membaca dan menulis pernyataan sederhana singkat padanya kehidupan sehari-hari).

Menurut UNESCO (2014: hlm.12) definisi literasi kembali digunakan dan dikembangkan lagi dalam *Education for All* 2000 *Assessment* dimana "*Literacy is the ability to read and write with understanding a simple statement related to one's daily life. It involves a continuum of reading and writing skills, and often includes also basic arithmetic skills (numeracy).* (Literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis dengan pemahaman sebuah pernyataan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu melibatkan sebuah kontinum dari keterampilan membaca dan menulis, dan sering kali berisi juga keterampilan aritmatika dasar).

Bila pendidikan kewarganegaraan menekankan literasi politik sebagai produk, dengan melakukan transmisi pengetahuan politik faktual menggunakan metode pembelajaran ditaktik, model kedua menekan pendidikan literasi politik sebagai proses. Model big issues dilakukan dengan memperkenalkan anak dengan isu-isu politik penting melalui berbagai diskusi dan debat-debat politik. Sudah barang tentu keduanya memiliki kelebiohan dan kekurangannya masing-masing (Davies & Hogarth: 2004)

Menurut Denver dan Hands (1990) dalam Karim dkk (2015: hlm.5), Literasi Politik (*political literacy*) merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik, suatu pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berperan serta, partisipasi) sebagai warga negara. Pengetahuan dan pemahaman ini oleh Cassel dan Lo (1997) sebagaimana dikutip Karim dkk (2015: hlm.5) disebut sebagai *political expertise* dan *political awareness*, yang intinya merujuk pada maksud sejauhmana seorang individu warga negara memberi perhatian dan memahami isu-isu politik. Menurut Bernard Crick (2000) dalam Putri (2015: hlm.79), yang mendefinisikan literasi politik sebagai pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari, dan bahasa merupakan upaya memahami seputar isu politik, keyakinan para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Ringkasnya, literasi politik pada dasarnya merupakan senyawa yang utuh dari pengetahuan (kognisi), keterampilan (psikomotor) dan sikap (afeksi).

b. Orientasi Literasi Politik terhadap Mahasiswa

Dalam hal ini Orientasi Literasi Politik juga mencakup pada bagian bagian pengertian yang dinamakan Melek Politik juga, Sehingga mengenai melek politik, Almond, Verba, & Simamora (1990) mengemukakan dua kriteria untuk mengukur dimensi melek politik yakni, *pertama* mengikuti segala kegiatan pemerintah. *Kedua* mengikuti laporan mengenai aktivitas pemerintah melalui berbagai media. Kriteria tersebut menggambarkan bagaimana kedudukan dan peran seorang warganegara yang memiliki tingkat melek politik yang akan berpengaruh terhadap jalannya sistem politik suatu negara. Sedangkan Suhiat (2009) mengemukakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat *political literacy* warganegara yakni mencakup pengetahuan konstitusi dan sistem politik, pemahaman politik, sikap politik, dan perilaku politik. Sedangkan Kantaprawira (2004) mengartikan melek politik sebagai perwujudan dari pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Abdurrahman (Suhiat, 2009) berpendapat bahwa

semakin tinggi taraf kesadaran seseorang maka akan semakin tinggi pula ketaatannya terhadap sistem politik dan juga sebaliknya. Melek politik berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang politik dan nilai-nilai Konstitusi yang mengatur kehidupan politik. Dari pengetahuan tersebut akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum sehingga akan muncul sikap penghayatan terhadap sistem politik tersebut. Berhubungan dengan kegiatan politik dan melek politik warga negara, (Uldam & Vestergaard, 2015) menyebutkan bahwa

> "*social media have been praised for their potential for facilitating civic engagement. At a time when one of the most difficult problems facing democracy in the Western hemisphere is the decline in citizens' participation in politics, this potential has been vested with hopes that social media can help reinvigorate extra-parliamentarian political participation – i.e. participation beyond the rights and obligations of liberal citizenship (e.g. voting) – and thus strengthen democratic accountability at national and international levels*."

Tinjauan lain dikemukakan oleh Bakker (2015) menyatakan bahwa,

> *"the many studies on social media, and the increasing number of studies considering their application by activists, provide several insights into the options social media offer for activists aiming for institutional change."*

Crick dan Porter (Fyfe, 2007) berpendapat bahwa

> "*A person who has a fair knowledge of what are the issues of contemporary politics, is equipped to have some influence, whether in school, factory, voluntary body or party, and can understand and respect, while not sharing, the values of others, can reasonably be called 'politically literate'.*

Jadi menurut para ahli tersebut seseorang yang melek politik adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang isu-isu politik kontemporer dan nilai-nilai lainnya. Crick dan Porter juga mengatakan bahwa seseorang yang melek politik akan memiliki kemampuan untuk menganalisa dimensi politik dari setiap situasi dan hal tersebut dikembangkan melalui pengetahuan, keterampilan dan sikap warga negara muda.

Menurut Bernard Crick (2000) dalam Putri (2015: hlm.79), yang mendefinisikan literasi politik sebagai pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari, dan bahasa merupakan upaya memahami seputar isu politik, keyakinan para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka

mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Ringkasnya, literasi politik pada dasarnya merupakan senyawa yang utuh dari pengetahuan (kognisi), keterampilan (psikomotor) dan sikap (afeksi).

Sedangkan Bev (2008) berpendapat bahwa:

> *"political literacy, refers to a set of skills necessary for citizens to participate in society's government. In short, there are abilities what we all need to master, so we can stand tall in front of those government officials who may have prejudices against their constituents and behave not in a respectable manner. It does not mean we aim to be a career politician, but to think and to act as an informed constituent. After all, those government officials cannot become who they are without us."*

Dengan kata lain, melek politik merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang warga negara dalam mengisi kegiatan pemerintahan dan sebagai konstituen dari pemerintah.

c. PKn Sebagai Pendidikan Politik

Pendidikan kewarganegaraan adlaah bagian penting dari pembentukan warga negara yang baik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kerr (Winataputra dan Budimansyah (2007, hlm.4) yang mengatakan bahwa:

> "*Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young for their roles and responsibility as citizens and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process, citizenship or civics education".*

Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga bersangkutan memiliki *poltical knowledge, awareness, attitude, political affiacacy,* dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian terpenting dari pembentukan warga negara yang baik. Sejalan dengan asumsi ini, Somantri (2001, hlm.299) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemuanya itu di proses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dan

mempersiapkan hidup demokratis. Kemudian tidak hanya siswa tetapi juga diberlakukan untuk mahasiswa yang gelarnya maha melebihi siswa.

Jika ditinjau dari tujuannya, PKn adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga neagra dala kehidupan politik masyarakat baik pada tingkat local maupun nasional, maka partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan dari sejumlah kompetensi yang di perlukan, yang terpenting adalah penugasan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, pengembangan karakter dan sikap mental tertentu dan komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional.

Menurut Gabriel Almond dalam Mas'oed (1986), pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang, menunjukan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sejalan dengan pendapat Wayan Sohib (2009) yang menyatakan bahwa pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik.

Maka dari itu, dengan melalui pendidikan kewarganegaraan menyalurkan atau di kembangkan pendidikan politik karena pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah mata pelajaran yang berbasis keilmuan, sebab benar berstandar pada disiplin keilmuan, demikian terbebas dari pengaruh kekuasaan, disiplin keilmuan PKn adalah kewarganegaraan dan hukum, selain itu disiplin ilmu ekonomi, sosilogi, antropologi, ilmu politik dan filsafat politil yang merupakan komponen utama dari PKn.

d. Hubungan PKn dengan Kedai Kopi dan Literasi Politik

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup serta isi.Visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Adapun misinya adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara memiliki peran yang vital bagi keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu, hubungan antara warga negara dan negara sebagai institusi yang menaunginya memiliki aturan atau hubungan yang diatur dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Agar dapat memiliki status yang jelas sebagai warga negara, pemahaman akan pengertian, sistem kewarganegaraan serta hal-hal lain yang menyangkut warga negara hendaknya menjadi penting untuk diketahui.

Dengan memiliki status sebagai warga negara, orang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan ini nantinya tercermin dalam peran, hak dan kewajiban secara timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Dalam beberapa literatur, dikenal istilah warga negara, rakyat dan penduduk. Istilah warga negara secara umum mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan Bersama. Menurut UdinWinataputra (2008) mengkaji bahwa rumusan tujuan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Hal tersebut analog dengan konsep Benjamin S. Bloom tentang pengembangan kemampuan yang mencakup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*)

menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral.(Suwarma, 2000) Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia. prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Keterampilan kewarganegaraan *(civic skills*) meliputi keterampilan intelektual (intellectualskills) dan keterampilan berpartisipasi(*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Watak/ karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Dimensi watak/ karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif. Dengan demikian, seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, terutama pengetahuan di bidang politik, hukum, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan secara intelektual maupun secara partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pada akhirnya, pengetahuan dan keterampilannya itu akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari. Watak, karakter, sikap atau kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, toleran. jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati hak orang lain, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, memiliki rasa kesetiakawanan sosial (Winarno, 2006).

Kapasitas dan kemampuan kewarganegaraan itu meliputi *Civic Knowledge, Civic Skill, dan Civic Virtue* (1998:hlm5) dan menurut Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas disebut dengan *Civic Knowledge, Civic Skill* yang terdiri *Intelectual Skill* dan *Participatory Skill*, dan *Civic Disposition* (Puskur, 2006:hlm 2). Maka dari itu terdapat point penting yang dapat dijadikan acuan, menganalisi juga mengidentifikasi ternyata rancangan tujuan tersebut sejalan searah dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Tiga aspek tersebut dapat juga dikembangkan pada ranah interaksi sosial masyarakat dan ruang publik.

Ruang publik dapat diartikan sebagai ruang bagi diskusi kritis yang terbuka bagi semua orang. Pada ruang publik, individu masyarakat berkumpul untuk membentuk sebuah publik dimana nalar publik ini akan diarahkan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah dan kekuasaan negara. Ruang publik mengasumsikan adanya kebebasan berbicara dan berkumpul, pers bebas dan hak secara bebas berpartisipasi dalam perdebatan politik dan pengambilan keputusan. Lebih lanjut, ruang publik dalam hal ini terdiri dari media informasi seperti surat kabar dan jurnal. Juga termasuk dalam ruang publik adalah tempat minum dan kedai kopi, balai pertemuan, serta ruang publik lain dimana diskusi sosio-politik berlangsung. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan suatu tempat untuk mengekspresikan diri seutuhnya mengarahkan masyarakat Indonesia menuju kedai kopi. Ekspresi kemauan dan kritik yang mau diungkapkan di kedai kopi hingga lama kelamaan kedai kopi menjadi suatu ruang publik. Artinya, kedai kopi merupakan sebuah tempat dengan keleluasan berekspresi, berpendapat dan saling menghargai pendapat masyarakat lainnya dalam sistem pemerintahan kota yang demokratis (F. Budi Hardiman, 2010:283).

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan referensi bagi penulis untuk menambah informasi sebagai memperkaya bahan kajian bagi penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

1. **Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutisna 2017 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tanggerang dengan judul "Strategi Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual."**

   Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana mengetahui dan memahami peningkatan pembelajaran sekolah. Pendidikan politik atau *voter education* sebagai upaya untuk meningkatkan literasi politik pemilih pemula hendaknya dilakukan lebih dini dan dalam durasi waktu yang relatif panjang, sekurangkurangnya sejak kelas X dan selama masa belajar di tingkat sekolah menengah atas (SMA/MA/SMK), dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dan mengintegrasikannya dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*). Dengan demikian para pelajar sebagai calon pemilih pemula memiliki kesempatan yang lebih lama, bahkan juga lebih intens dari sisi penyerapan dan penghayatan pengetahuan, sikap dan perilaku politik-kenegaraan, untuk mempersiapkan diri menjadi pemilih pemula yang cerdas, kritis, rasional dan bertanggungjawab di kemudia hari. Dalam kaitan ini semua tema materi pembelajaran di dalam buku pendidikan kewarganegaraan dapat dihubungkan sedemikian rupa dengan kebutuhan peningkatan literasi politik para siswa.

2. **Penelitian yang dilakukan oleh Ane Permatasari 2015 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul "Membangun Kualitas Bangsa denga Budaya Literasi."**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan minat baca di Indonesia sehingga menumbuhkan budaya literasi. *Pertama*, kita perlu memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan agar bisa mendorong tingkat melek huruf yang lebih tinggi. Infrastruktur (fasilitas) dan suprastruktur (sumber daya manusia) perlu dikembangkan hingga menjangkau pelosok Tanah Air. Jangan sampai ada masyarakat di pedalaman Nusantara yang masih sulit belajar garagara tidak ada sekolah, kekurangan guru, atau minim fasilitas lain. Negara bertanggung jawab memenuhi fasilitas pendidikan bagi warganya *Kedua*, kita bangun lebih banyak perpustakaan di semua daerah sebagai tempat yang nyaman untuk membaca, jumlah koleksi buku yang banyak, dan menawarkan kegiatan yang menarik. *Ketiga*, lebih memperkenalkan buku dan mendorong minat baca buku ke sekolah dan masyarakat umum. Jangan terpaku pada seremoni, tetapi fokus pada terobosan yang lebih membumi dan memikat kaum muda untuk membaca. *Keempat*, dari sisi penerbit, kita dorong agar semakin banyak buku diterbitkan, terutama buku-buku yang berkualitas dari berbagai bidang. Kian banyak tawaran buku menarik, kian banyak alternatif bacaan bagi masyarakat. *Kelima*, kita dukung kekuatan masyarakat madani untuk bersama-sama pemerintah dan semua pihak membangun peradaban membaca buku. Bentuknya bisa berupa pendirian taman bacaan hingga ke pelosok Nusantara, program pendorong membaca, atau langkah-langkah lain yang mungkin diambil untuk memprovokasi anak muda agar mempunyai minat baca tinggi.

3. **Penelitian yang dilakukan oleh Gelora Cita 2015 Universitas Riau dengan judul "Studi Tentang Fungsi Warung Kopi Bagi Masyarakat Di Kota Bagansiapiapi"**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui Fungsi warung kopi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapati bahwa fungsi warung kopi yaitu dijadikan masyarakat sebagai tempat bersosialisasi, dimana disini mereka berinteraksi antara satu dengan yang lainnya saling berbagi cerita, berdiskusi, dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk mendapatkan informasi,

dimana informasi tentang keadaan sekitar yang terbaru mudah didapati diwarung kopi, semua informasi dan informasi pekerjaan juga mereka dapati di warung kopi. Selain itu warung fungsi warung kopi juga sebagai tempat sumber penghasilan/ sumber rezeki, dimana disini negoisisasi untuk sebuah kegiatan dan lobi bisnis juga dilakukan diwarung kopi. sebuah tempat yang pada dasarnya untuk menyediakan minuman kopi atau minuman panas lainya., fungsi dari warung kopi dilihat memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkumpul, membaca dan bercerita antara individu dan kelompok sehingga terjadilah interaksi sosial. Lingkungan mempengaruhi bentuk interaksi seseorang yang terjadi pada suatu individu. Dalam hal ini, dimana lingkungan berupa temanteman mempunyai dampak bagi seseorang terhadap motivasinya terhadap sesuatu seperti motivasi seseorang terhadap berkunjung ke warung kopi.

4. **Penelitian ini dilakukan oleh Haryanto, Ria Wikantari, Afifah Harisah, Viktor Sampebulu 2016 Universitas Hasanuddin dengan judul "Keberadaan Warung Kopi Sebagai Ruang Publik di Kota Makassar."**

Fenomena warung kopi sebagai fenomena kultural yang hidup di masyarakat telah menjadi sarana publik untuk berinteraksi dan berdiskusi serta terus berkembang telah menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dalam melakukan rutinitas kesehariannya dengan latar belakang pengguna yang beragam. Anggapan keberadaan warung kopi sebagai ruang publik semakin kuat sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah warung kopi. Warung kopi pada akhirnya menjadi ruang publik multifungsi. Dalam setiap prosesnya ruang publik membutuhkan pelaku sebagai alat menjalankan ruang publik tersebut. Warung kopi membutuhkan pelaku atau orang orang yang berada di Warung tersebut hingga terbentuk suatu ruang publik. Pelaku tersebut adalah masyarakat.

5. **Penelitian ini dilakukan oleh Anrical Universitas Negeri Makassar dengan judul "Warung Kopi dan Ruang Publik Studi Pergerseran Ruang Ekspresi Waktu Senggang ke Ruang Entitas Budaya Populer."**

Wacana publik, selalu akan melibatkan keberadaan suatu proses saling mempengaruhi (*interplay*) antara wacana publik, dan interaksi pribadi. Pertemuan dan percakapan sehari-hari di ruang publik (warung kopi), akan terus mengindetifikasi individu pengunjung ruang publik tersebut. Produksi wacana, lewat "ngomong-ngomong," suka atau tidak, akan terus orang yang mengikuti alur diskusi, untuk mempercayai wacana yang diperbincangkan. Karena itu, meskipun di luar ambiguitasnya, wacana berita (diskusi) selalu penting bagi pelaku konflik mana pun, sehingga penting bagi siapapun untuk dapat mempengaruhi wacana semacam ini. Pengunjung yang memiliki nilai orasi tinggi, tentu akan terus memunculkan ide-ide, yang dapat melahirkan aksi di luar warung kopi.Pergeseran makna warung kopi di kota makassar dari ruang ekspresi waktu senggang ke ruang entitas budaya popular terletak pada penyediaan fasilitas yang beragam untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengunjung. Pada warung kopi tradisional yang dikelola secara sederhana, fungsi warung kopi hanya sebagai penyedia minuman kopi sedangnkan warung kopi modern yang dikelola dengan manajemen yang lebih baik, menyediakan berbagai macam fasilitas pendukung yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung. Oleh karena itu peneliti mendapatkan beberapa upaya yang di dapatkan oleh peneliti ialah :

a) Kebutuhan Masyarakat akan Ruang Publik
b) Hendaknya warung kopi mempertahankan dampak yang tercipta secara otomatis sebagai ruang sosial budaya yang tidak mengkotak-kotakkan masyarakat umum .
c) Hendaknya warung kopi tidak mengembangkan usahanya menginovasi usahanya kearah modernisasi yang cenderung menjauhkan pelanggang dari masyarakat ekonomi bawah.
d) Hendaknya warung kopi membuat forum atau lesehan tersendiri agar masyarakat ingin berdiskusi lebih nyaman.
e) Warung kopi mempunyai komunitas yang secara langsung menjembatani aspirasi masyarakat serta ada komunikasi antara pejabat daerah dan masyarakat secara rutin agar tersalurkannya aspirasi masyarakat membentuk suatu opini publik yang tepat sasaran.

3. Kerangka Pemikiran

Sebuah literasi politik mahasiswa sangatlah berperan penting terhadap kemajuan dan perkembangan intelektualias mahasiswa maupun kepekaan terhadap keadaan dinamika politik yang sedang terjadi, lalu pada proses kegiatan perbincangan politik mahasiswa juga terdapat berbagai macam tempat dan bermunculannya inovasi baru dalam perbincangan literasi politik tersebut yang ternyata juga terdapat banyak tempat warung/kedai kopi yang bisa dijadikan munculnya sebuah perbincangan politik. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti mengangkat judul "Peranan Kedai Kopi Dalam Menumbuhkan Budaya Literasi Politik Mahasiswa".

Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut: Kedai kopi masih di anggap hanya sekedar sebagai bagian gaya hidup yang bisa membuat eksistensi diri menjadi sebuah taraf tatanan sosial. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain peneltian studi kasus karena peneliti merasa bahwa bias optimal dalam menjalankan observasi dan wawancara hingga menciptakan hasil penelitian yang diinginkan. Dan diiringi teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hingga menghasilkan hasil penelitian menumbuhkan peran kedai kopi dalam budaya literasi politik mahasiswa.
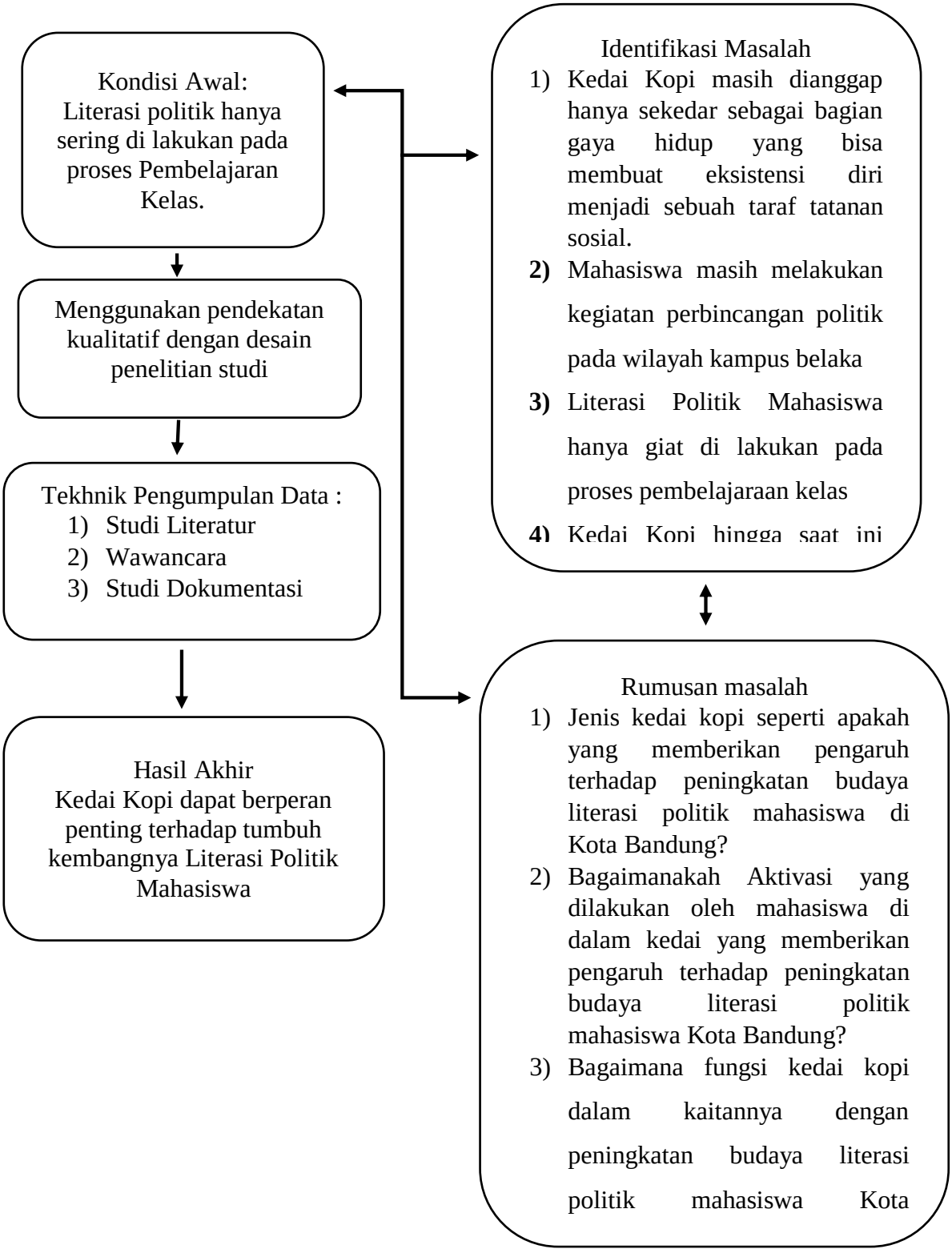
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran